

RESPONSIBILITY TO PROTECT (RTPR) UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) DALAM PENANGANAN ANCAMAN KRISIS AIR DI OGONI NIGERIA TAHUN 2006-2011

I Dewa Ayu Mita Prayatni¹⁾, Sukma Sushanti^{2),} Anak Agung Ayu Intan Prameswari³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: mitaprayatni@gmail.com¹, sukmasushanti@gmail.com², prameswari.intan@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to analyze the UNEP process in response facing the threat of water crisis in Ogoni, Nigeria through Responsibility To Protect (RTPR) in human security perspective. The water crisis caused a threat to the survival of the Ogoni community by decreasing the water quantity supply, increasing economic, social and health issues. This issue discussed by answering question to how UNEP implementing the Responsibility to Protect (RTPR) in dealing with water crisis issues in Ogoni, Nigeria. This research used collected data from various sources including, literary sources, news and reports. Data were analyzed with responsibility to protect of international community from human security perspective in international relations. By using descriptive qualitative method, this research shows what is done by UNEP as a fulfillment of the fundamental rights of the Ogoni community through environmental assessment project and regulatory policy recommendations as well as build a facility sanitation and water supply.

Keywords: Nigeria, Water Crisis, UNEP, Human Security, Responsibility to protect (RTPR)

1. PENDAHULUAN

Mendapatkan akses air bersih yang cukup, aman, layak dan dapat dikonsumsi merupakan hak tiap individu. Hak atas ketersediaan air bersih juga telah ditetapkan oleh Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*The Committee on Economic, Social and Cultural Rights/ CESCR*) PBB bulan November 2002, yakni pada *general comment* no.15. Menurut dokumen PBB tersebut hak atas air bersih merupakan salah satu yang terpenting untuk direalisasikan disebabkan oleh kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada ketersediaan air bersih (Coleman, 2012).

Dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan manusia akan sulit dijalankan tanpa adanya air bersih. Oleh sebab itu, pemenuhan akan

kebutuhan air bersih baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Sehingga ketersediaan air bersih sangat perlu dijaga agar tidak muncul masalah berupa krisis air bersih. Krisis air bersih merupakan sebuah fenomena yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Terjadinya krisis air dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kekurangan sumber mata air, pencemaran lingkungan, kekeringan dan banjir.

Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat di Nigeria, meskipun negara tersebut merupakan salah satu negara produsen minyak terbesar keenam di dunia dengan rata-rata produksi 2,7 juta barel per hari mengalami

permasalahan krisis air yang berdampak sangat signifikan bagi kehidupan masyarakatnya (Badejo, n.d).Krisis air bersih di Nigeria bermula ketika perusahaan minyak milik *Shell Petroleum Development Company* (SPDC) melakukan pengeboran pertama pada tahun 1956, di Ogoni yang merupakan desa/komunitas yang berada di kawasan Delta Niger, Nigeria.

Aktivitas dari eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut mengakibatkan sekitar 2.369.470 barel minyak yang tumpah ke lingkungan dan sumber air di Nigeria yang akhirnya mencemari perairan, tanah persawahan dan sumber air untuk irigasi (Badejo, n.d). Menurut studi yang dilakukan *Niger Delta Environment Survey* (NDES) pada tahun 2000 terdapat pula penurunan kuantitas air di Ogoni. Pada tahun 2003 hingga tahun 2006 menunjukkan kuantitas air yang tersedia untuk keperluan rumah tangga di kawasan tersebut menurun. Namun pada tahun 2005 kuantitas air yang tersedia mengalami kenaikan sebanyak 140.593,03 m³. Kenaikan tersebut dikarenakan pada tahun 2005 pemerintah Nigeria menerapkan program *The National Water Policy* (NWP) untuk mendukung *supply* air.

Penerapan program tersebut tidak berpengaruh secara signifikan karena pada tahun 2006 kuantitas air yang tersedia kembali mengalami penurunan. Sehingga jumlah pasokan air di tahun 2003 sebanyak 141.531,7 m³ berkurang menjadi 94.435,8 m³ di tahun 2006. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya biaya dalam realisasi program, serta kurang efektifnya pemeliharaan alat dan distribusi

program (Chukwu, 2015). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Niger Delta Environmental Survey (NDES) juga menyatakan, 73,2% dari responden dikawasan Delta Niger mengkonsumsi kurang dari 100 liter per kapita per hari. Hal tersebut sangat jauh dari standar yang dikeluarkan oleh WHO yaitu 120 liter per kapita per hari (*Niger Delta Environmental Survey* (NDES), 2000).

Selain adanya penurunan kuantitas air, menurut data penelitian yang dikeluarkan oleh UNEP pada tahun 2007 menyatakan bahwa sumber mata air dikawasan Ogoni tercemar senyawa hidrokarbon dan bensol (Programme U. N., 2011). Kondisi tersebut kian memperparah situasi di Ogoni. Masyarakat Ogoni terpaksa harus mengkonsumsi air sungai yang sudah tercemar sehingga banyak masyarakat Ogoni yang terserang penyakit kulit, diare dan kanker (Oyibode, 2016). Hal ini disebabkan karena tidak adanya alternatif lain untuk konsumsi air bersih.

Selain kanker, Masyarakat Ogoni juga banyak yang mengalami penyakit pernafasan seperti asma dan bronchitis. Kebanyakan penderita berasal dari kalangan anak-anak atau balita disebabkan oleh kondisi tubuh yang masih rentan terhadap segala macam penyakit (Livesey, 2001).

Krisis air tersebut kemudian menimbulkan polemik di antara *grassroot*¹ bersama aktifis lingkungan dengan pemerintah.

¹ suatu lapisan masyarakat yang berada paling bawah, yang merasakan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan yang sulit. Dikutip dari kamus online Cambridge. Diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/h/grassroots>. Pada tanggal 29 april 2018 pukul 16:12 wita.

Mengingat permasalahan tersebut tidak menemukan titik-terang sejak tahun 1956.

Pecah konflik pertama antara *grassroot* dengan pemerintah Nigeria dimulai pada tahun 1990. Pada tahun tersebut muncul gerakan yang bernama *Movement for the Survival of the Ogoni People* (MOSOP) (Manby, p. n.d). Gerakan aksi protes ini menyuarakan hak dari masyarakat ogoni dengan membuat *Ogoni Bill of Rights*. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan Shell beroperasi di Ogoni Delta Niger, serta melakukan pembersihan atas tumpahan minyak yang terjadi pada sumber-sumber mata air dan lingkungan yang tercemar. Berbagai aksi protes yang dijalankan oleh MOSOP tersebut diprakarsai oleh Ken Saro Wiwa yang merupakan seorang aktivis lingkungan di Nigeria. (Hallmark, 2017)

Pemerintah Nigeria merespon adanya tekanan tersebut dengan memperbaiki sistem dan regulasi kebijakannya termasuk penanganan masalah *oil spill* serta manajemen mengenai *water supply* dan sanitasi (Nigeria: Petroleum, Pollution and Poverty in The Niger Delta, 2009). Namun hingga saat ini pemerintah Nigeria belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai pada akhirnya Negara harus bersikap represif terhadap warganya sehingga terjadi pelanggaran HAM ketika adanya konflik berkepanjangan. Terlihat pemerintah Nigeria tidak memiliki kapabilitas dalam proteksi hak asasi manusia warganya. Sampai pada akhirnya tahun 2006, organisasi internasional dibawah naungan PBB yaitu UNEP (*United Nations Environment Programme*) merespon permasalahan krisis air di Nigeria

dengan melakukan *assessment*² di negara tersebut. Tindakan yang diambil oleh UNEP merupakan sebuah bentuk tanggung jawab *Responsibility To Protect* (RTPR) komunitas internasional³ dalam perspektif *human security* mengatasi permasalahan ancaman keamanan Nigeria.

Permasalahan krisis air di Ogoni tersebut dinilai sebagai *Global Public Good*⁴ yang memerlukan kolektif respon tidak hanya dari negara namun juga respon dari komunitas internasional. Hal inilah yang menjadikan UNEP terlibat menyelesaikan permasalahan krisis air di Negara tersebut. Sehingga UNEP ditujukan sebagai pihak yang nantinya mampu berperan dalam mengatasi permasalahan krisis air di Ogoni, Nigeria (Programme, 2011).

² Menurut Glosarium Kementerian Sosial Republik Indonesia Assesmen adalah Proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi klien, serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan klien. Diunduh dari Kepmensos No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Diakses melalui <https://www.kemsos.go.id/content/asesmen>, pada tanggal 11 februari 2018 pukul 15:45 wita

³ Menurut Konsep *Human Security* dalam Tadjbakhsh dan Chenoy (2007) *Responsibility to Protect* (RTPR) Komunitas Internasional merupakan respon komunitas internasional jika dengan berbagai sebab, suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka itu akan menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk memberikan perlindungan.

⁴ Dalam Tadjbakhsh dan Chenoy (2007) *Human Security* memandang masalah yang mengancam kelangsungan hidup individu yang berasal dari ancaman keamanan insani dipandang sebagai bentuk dari *global public goods*. Sehingga memerlukan respon kolektif dari berbagai aktor di arena internasional dalam penyelesaiannya tanpa memandang adanya batasan dalam suatu Negara.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua tulisan sebagai kajian pustaka yaitu tulisan karya Yasushi Katsuma dengan judul *Education as an Approach to Human Security: A Case of Afghanistan* yang dipublikasikan tahun 2004 dan tulisan karya Ross Michael Pink dengan judul *Water Rights in China and India: A Human Security Perspective* yang dipublikasikan pada tahun 2016. Tulisan pertama yang berjudul *education as an Approach to Human Security: A Case of Afghanistan* (2004) karya Yasushi Katsuma memaparkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan perempuan sebagai fokus utamanya dalam pendekatan *human security* di Afghanistan. adanya isu diskriminasi terhadap kaum perempuan Afghanistan dibawah rezim Taliban, terdapat kebijakan melarang kaum perempuan untuk bersekolah dan mobilitas mereka yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kaum laki-laki negara tersebut.

Katsuma (2004) menekankan bagaimana upaya komunitas internasional merespon permasalahan jika sebuah Negara tidak mampu memenuhi kewajibannya mewujudkan hak masyarakatnya sebagai bentuk *responsibility to protect* (RTPR) Sebagai tanggapan, komunitas internasional mencoba memberikan respon dengan mempromosikan pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan dengan mendukung sekolah berbasis rumah di tingkat masyarakat.

Tulisan kedua yaitu *Water Rights in China and India: A Human Security Perspective* (2016) karya Ross Michael Pink memaparkan bahwa sebuah Negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia yaitu Cina and

India yang tengah menghadapi permasalahan krisis air sebagai fokus utamanya. Penelitian Pink (2016) ini lebih menekankan bagaimana suatu permasalahan dapat mengancam keamanan kedua negara tersebut serta memiliki hubungan interkonektivitas antara satu sama lain sesuai dengan tujuh bentuk ancaman dalam konsep *human security*. Pink (2016) menganalisis ancaman tersebut seperti efek domino. Permasalahan krisis air bersih yang terjadi di kedua negara tersebut tentunya akan berdampak pada kehidupan manusia seperti terjadinya kelaparan karena sumber daya alam yang berkurang, kehilangan mata pencaharian, hingga akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai.

Kedua tulisan tersebut memperkuat justifikasi penelitian ini dimana dijelaskan bahwa terdapat suatu permasalahan yang mengancam kelangsungan hidup manusia namun negara tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan dan memberikan hak di tiap-tiap individu negaranya sehingga perlu adanya keikutsertaan dari organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu dijelaskan pula pemahaman mengenai pentingnya masalah baru yang berkaitan dengan ancaman-keamanan terhadap masyarakat yang harus segera ditindak lanjuti serta menjadi prioritas utama baik negara maupun komunitas internasional melalui *responsibility to protect* (RTPR) dalam merealisasikan tanggung jawabnya.

3. METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan

mendesripsikan bagaimana proses organisasi internasional yaitu UNEP dalam mengatasi ancaman krisis air di Ogoni, Delta Niger sebagai bentuk tanggung jawab melalui *Responsibility to Protect*. Data yang digunakan adalah data- data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi berupa literature atau jurnal dalam bentuk buku atau e-book yang berkaitan dengan pembahasan yaitu upaya komunitas internasional dalam bertanggung jawab mengatasi ancaman lingkungan di suatu negara melalui konsep *responsibility to protect* (RTPR) dalam *human security*.

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah sistem internasional yaitu UNEP. Unit analisis tersebut digunakan untuk melihat serta menganalisis proses UNEP dalam mengatasi ancaman krisis air dalam mengatasi ancaman lingkungan yaitu krisis air di Ogoni, Delta Niger Nigeria pada tahun 2006-2011 melalui *responsibility to protect* (RTPR) dalam perspektif *human security*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung hanya melalui teknik studi kepustakaan serta analisis melalui dokumen dengan analisis melalui hasil laporan penelitian yang berupa literature atau jurnal dalam bentuk buku atau e-book yang menyajikan informasi dan data yang berkaitan dengan proses yang dilakukan UNEP dalam mengatasi ancaman lingkungan yaitu krisis air di Ogoni, Delta Niger, Nigeria dan disajikan secara teks dalam bentuk narasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif *human security* peran Negara sangat dibutuhkan karena negara

sebagai aktor yang berwenang memiliki kapabilitas untuk melindungi individu yang tinggal dalam batas-batas wilayahnya. *Human security* memandang Kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*) negara dalam menciptakan keamanan bagi masyarakatnya (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Pada hakekatnya dalam perspektif *human security* Negara memiliki tiga kewajiban tanggung jawab (*responsibility to protect*) dalam merespon suatu permasalahan domestiknya.

Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab negara dalam mencegah dan melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat dan menjamin kesejahteraan mereka, serta memberdayakan masyarakat. Namun tidak semua negara dapat menjalankan fungsi tersebut secara maksimal. Seringkali Negara tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal ini dikarenakan bilamana sesuatu hal, Negara tidak mampu atau tidak memiliki kapabilitas (*incapable state*) atau tidak memiliki kemauan (*unwilling state*) untuk melindungi serta bertanggung jawab atas permasalahan yang sedang dihadapi masyarakatnya.

Secara harafiah dalam Tadjbakhsh dan Chenoy (2007) *incapable state* merupakan ketidakmampuan negara untuk menegakkan hukum, membuat kebijakan yang bersifat berkelanjutan, memiliki institusi dan badan negara yang tidak efektif, tidak mampu memaksimalkan penggunaan pajak dan yang terpenting adalah tidak mampu menyediakan fasilitas publik yang penting. Hal tersebut secara jelas menggambarkan situasi di Nigeria saat ini.

Terlihat ketika pemerintah Nigeria tidak mampu mengimplementasikan kebijakannya dalam penanganan masalah krisis air di Ogoni. Pemerintah Nigeria tidak memiliki kapabilitas dalam membuat serta menjalankan kebijakan dalam penanganan masalah krisis air di Negaraanya secara efektif. Merujuk pada konteks human security walaupun negara tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, terdapat mekanisme penyelesaian permasalahan terkait ancaman keamanan insani yaitu melalui keterlibatan International community. Hal inilah yang merepresentasikan Organisasi Internasional yaitu UNEP terlibat dalam penyelesaian masalah di Ogoni.

Dalam perspektif *human security* keterlibatan aktor internasional menjadi suatu hal yang signifikan dalam mekanisme penyelesaian permasalahan ancaman keamanan insani di suatu Negara. Sehingga pada konteks *human security* kedaulatan negara tidak lagi dipandang sebagai perisai yang bersifat eksklusif untuk terhindar dari intervensi aktor internasional terlibat menyelesaikan permasalahan kejahatan yang luar biasa (MacFarlane & Khong, 2006). Sehingga semua aktor di arena internasional memiliki peran untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Melihat pola keterlibatan UNEP dalam menyelesaikan permasalahan krisis air di Ogoni, Nigeria penelitian ini merujuk kepada tiga asumsi dasar konsep *human security* dalam Tadjbakhsh & Chenoy (2007). Dalam penelitian ini melihat UNEP memposisikan bagaimana posisi individu sangat penting untuk dilindungi. Tiga asumsi dasar dari perspektif *Human*

security tersebut adalah *Security from what? Security of whom? dan Security by what means?.* Dalam *human security*, asumsi pertama yaitu *Security of whom?* menekankan pada individu sebagai objek penting yang harus diperhatikan. Keberadaan individu merupakan sesuatu hal yang penting walaupun individu merupakan bagian terkecil dari entitas negara. Namun lebih dari itu, individu dapat dikatakan menjadi penentu nasib dari suatu komunitas atau masyarakat yang berada di suatu wilayah Negara tersebut.

Penelitian ini melihat melalui perspektif *human security* bagaimana UNEP mendeskripsikan bahwa fenomena yang terjadi di Ogoni merupakan sebuah permasalahan yang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor maupun sektor tertentu namun lebih luas yaitu apa yang salah dari kondisi di Negara tersebut sehingga mengancam keberadaan individu negara tersebut. Masyarakat ogoni kebanyakan tidak mendapatkan hak-hak dasarnya dengan baik, khususnya hak untuk mendapatkan akses air bersih yang layak.

Asumsi kedua pada *human security* yaitu *security for what?* Keamanan tidak selalu berfokus terhadap nilai pencapaian kesejahteraan individu namun berfokus pada resiko yang dapat mengancam serta merampas kesejahteraan yang menjadi hak tiap individu. UNEP berusaha melihat bahwa permasalahan krisis air di Nigeria dapat mengancam kelangsungan hidup individu di Nigeria. Krisis air bersih yang terjadi dapat memberikan efek domino pada kelangsungan hidup individu di Ogoni Nigeria (Nef, 1999). Permasalahan krisis air memiliki interkoneksi dengan

permasalahan lainnya seperti terjadinya kelaparan karena sumber daya alam yang berkurang, kehilangan mata pencaharian, hingga akses sumber mata air bersih dan sanitasi yang tidak memadai. Selain itu, permasalahan tersebut juga dapat mengancam stabilitas keamanan negara Nigeria karena human security menjelaskan bahwa eksistensi dari keamanan negara akan terganggu dan terancam jika kesejahteraan dari individu sebagai suatu entitas negara terganggu, maka diyakini bahwa keamanan negara secara keseluruhan juga akan terancam (Howard-Hassmann, 2012).

Ancaman lingkungan merupakan ancaman yang menggambarkan situasi di Ogoni saat ini. Ancaman tersebut pada konsep *human security* memaparkan mengenai bagaimana masalah lingkungan dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam untuk konsumsi manusia. Hal ini berkaitan dengan ancaman yang akan lebih banyak masuk ke dalam kategori *'freedom from want'*. Ancaman dari masalah lingkungan yaitu krisis air muncul di Ogoni, Nigeria karena individu merasa kehidupan yang tidak sejahtera membuat mereka hidup dalam ketidaktenangan. Akses terhadap air bersih untuk kelangsungan hidup individu merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital. Sumber daya air memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi maka akan mengancam kelangsungan hidup serta kesejahteraan individu tersebut.

Asumsi ketiga dalam mendeskripsikan permasalahan krisis air di Ogoni Nigeria yaitu

Security by what means? Pada asumsi ini menekankan pada strategi yang digunakan dalam mengatasi ancaman lingkungan khususnya mengenai krisis air di Nigeria. Cara yang digunakan dalam konsep ini dengan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Seperti yang dilakukan oleh badan internasional antar-pemerintah negara, yaitu UNEP melalui assessment yang membantu dan mengawasi pembangunan sistem regulasi kebijakan masalah lingkungan di Nigeria secara menyeluruh, baik dari pembangunan individu, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang berkualitas. Keterlibatan UNEP dalam mengatasi krisis air di Nigeria direalisasikan pada tahun 2006 hingga 2011. Hal ini menunjukkan adanya strategi berkelanjutan yang dilakukan oleh UNEP sebagai bentuk respon komunitas internasional bertanggung jawab mengatasi suatu permasalahan individu yaitu khususnya masyarakat di Ogoni Nigeria.

Melalui perspektif *human security* dalam penerapan strategi tersebut terdapat upaya yang harus dilakukan UNEP. Upaya yang dilakukan oleh UNEP ini merupakan bentuk dari tanggung jawab *international community* atau *responsibility to protect*. Lincoln Chen (dalam King & Murray, 2001-2002) mendeskripsikan terdapat cara atau strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ancaman kemanan insani melalui perspektif *human security* yaitu *risk assessment, prevention, protection, and compensation*. *Risk assessment* ini bertujuan untuk mendeskripsikan akar dari permasalahan serta resiko yang didapatkan akibat munculnya permasalahan dalam suatu populasi tertentu maupun

masyarakat. *Human security* menekankan pentingnya *assessment* sebagai metode yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan ancaman keamanan (King & Murray, 2001-2002). Strategi ini merupakan cara yang tepat dan efektif untuk melakukan pendekatan serta mencari akar persoalan dari permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini menggambarkan UNEP melakukan *assessment* di Ogoni Nigeria sebagai *responsibility to protect* komunitas internasional. Pertama UNEP terlebih dahulu mempersiapkan rencana serta target dari penilaian yang komprehensif. Setelah tahap perencanaan selesai, selanjutnya UNEP merilis hasil dari *assessment* tersebut. *Assesment* tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah Nigeria. Sehingga dalam penerapannya negara dapat mengimplementasikannya melalui regulasi kebijakan publik yang lebih efektif sebagai bentuk pencegahan serta proses pembangunan kembali pasca terjadinya degradasi lingkungan.

Dalam mengatasi permasalahan krisis air di Ogoni Nigeria sebagai wujud *responsibility to protect international community* UNEP melakukan penilaian berbasis lingkungan di negara tersebut. Pada tahapan pertama tahun 2006 UNEP melakukan perencanaan atas penilaian berbasis lingkungan di Ogoni Nigeria. Proses perencanaan penilaian tersebut dimulai dari UNEP melakukan diskusi dengan stakeholder meliputi presiden Nigeria, pemerintah serta manajemen perusahaan minyak SPDC (Programme, Environmental Assessment Of Ogoniland, 2011). Diskusi ini dilaksanakan oleh UNEP bertujuan untuk

mengajak para petinggi tersebut mengunjungi desa Ogoni dan bertemu dengan para petinggi masyarakat Ogoni. Hal ini dilakukan oleh UNEP dengan tujuan memfasilitasi mediasi untuk mengetahui serta memahami perspektif dan harapan masyarakat setempat. Selain melakukan diskusi UNEP juga mempersiapkan perencanaan strategis yang komprehensif dengan melakukan presentasi proposal yang meliputi rencana kerja dari tahun 2007 hingga 2011 dan membuat rancangan anggaran biaya yang diperlukan dalam mengatasi krisis air di Ogoni Nigeria.

Pada bulan Januari tahun 2007 UNEP membagi penilaian atas krisis air di ogoni Nigeria kedalam dua tahapan yaitu pertama Penilaian komprehensif lingkungan Ogoni Delta Niger Nigeria dan yang kedua merupakan hasil dari penilaian lingkungan berupa rekomendasi kebijakan untuk pembersihan lingkungan berdasarkan penilaian dan perencanaan yang sudah disepakati bersama antara UNEP dengan pemerintah Nigeria (Programme, Project Document Environmental Survey of Ogoniland , 2007). Penilaian lingkungan yang dilakukan oleh UNEP ini terbagi atas 8 subjek penilaian. Subjek tersebut meliputi aspek lingkungan seperti kontaminasi minyak terhadap tanah tanah (*soil contamination*), pencemaran air bawah tanah (*groundwater contamination*), radioaktif (*naturally occurring radioactive*), kontaminasi minyak terhadap air permukaan (*surface water*), kontaminasi minyak terhadap ikan, dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran minyak, kontaminasi minyak terhadap hutan bakau, kontaminasi gas atau zat kimia di udara serta dampak pencemaran

minyak terhadap kesehatan masyarakat (Programme, Project Document Environmental Survey of Ogoniland , 2007).

Dalam proses penilaian lingkungan, UNEP juga menggunakan beberapa cara dalam rangka pemulihan lingkungan di Ogoni sebagai upaya mengatasi permasalahan krisis air yang terjadi di Negara tersebut. Terdapat dua proses dalam mengatasi krisis air melalui program remediasi lingkungan *Remediation by Enhanced Natural Attenuation* (RENA) yaitu:

a. Proses Remediasi Tanah

Remediasi tanah akan terbagi kedalam tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu melalui teknologi canggih yang terdiri dari Insinerasi, Desorpsi Termal, dan Hidroksing. Kedua teknologi menengah yang terdiri dari *Ex Situ Biotreatements* yang menggunakan membran *high density polyethylene* (HDPE) untuk mencegah terjadinya kontaminasi lokasi tempat remediasi *Ex situ* dilakukan. Terakhir teknologi sederhana yang meliputi *In-situ* lahan pertanian melalui peningkatan atenuasi alami.

b. Remediasi Air Tanah.

Remediasi air tanah juga akan terbagi kedalam tiga tahapan yaitu Teknologi canggih meliputi Pemompaan dan teknologi pengolahan air. Kedua teknologi menengah meliputi penanaman tanaman *Reed bed*, melakukan pemisahan minyak dengan menggunakan *oil traps* serta melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas penahan minyak (*absorbent booms*). Terakhir yaitu melalui teknologi sederhana dengan cara peningkatan atenuasi alami. Cara-cara ini dilakukan dengan menutup sumber tumpahan minyak dan memblokir gorong-gorong serta

menggali parit-parit disekitar tumpahan minyak melalui tiga tahapan teknologi tersebut. Hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan tumpahan minyak meluas ke daerah-daerah lainnya.

Pada tahun 2011 UNEP merilis sebuah rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah Nigeria, masyarakat serta stakeholder perusahaan minyak yang telah mencemari lingkungan di Ogoni. Hasil dari proses penilaian yang dilakukan UNEP tersebut terbagi atas dua bagian. Bagian pertama merupakan rekomendasi teknik mengenai cara yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi di Ogoni saat ini khususnya penanganan krisis air di Negara tersebut yaitu:

a) *Operational recommendations* merupakan tahapan pertama dari bagian pertama hasil dari penilaian lingkungan yang dilakukan oleh UNEP di Ogoni yaitu mengenai rekomendasi operasional yang harus dilakukan sebagai langkah awal pencegahan terhadap terjadinya luapan minyak kembali. Pada tahapan ini juga berisikan bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi krisis air di Ogoni yang meliputi pemeliharaan fasilitas supply air yang masih dapat digunakan, penutupan ladang minyak illegal serta pencegahan dan penghentian seluruh aktifitas kegiatan industry minyak illegal.

b) *Technical recommendations* merupakan tahapan kedua pada bagian pertama hasil dari penilaian lingkungan oleh UNEP yang berisikan rekomendasi pembersihan minyak pada sumber-sumber air dan tanah, remediasi rawa-rawa, pembersihan lahan hutan bakau, serta pembersihan air tanah melalui proses in situ dan ex situ. Pada tahapan ini

UNEP membuat suatu badan pengelolaan lingkungan terpadu yaitu *Integrated Contaminated Soil Management Centre*. Pusat pengelolaan ini merupakan pusat perawatan lingkungan untuk bioremediasi dan pusat kontrol utama atas aliran air bersih yang akan bertindak sebagai pusat dari penanganan, pengolahan dan pembersihan tanah dan air yang telah tercemar oleh minyak.

c) *Public health recommendations* merupakan tahapan ketiga pada bagian pertama hasil dari penilaian lingkungan oleh UNEP. Pada tahapan ini UNEP merekomendasikan langkah apa yang harus dilakukan pada masyarakat ogoni yang hidup dalam ketidakamanan. UNEP merekomendasikan untuk melakukan pengawasan medis serta melakukan analisis kesehatan di tiap kelompok masyarakat Ogoni hal ini dilakukan sebagai proses dalam pencegahan serta pemberdayaan masyarakat untuk memastikan setiap dampak kesehatan yang terjadi dapat diidentifikasi secara awal dan segera dapat ditindaklanjuti. Pemeriksaan medis secara rutin juga harus dilakukan karena sebagian besar masyarakat Ogoni telah rutin mengkonsumsi makanan maupun air dari sumber yang terkontaminasi oleh minyak.

Pada bagian kedua hasil penilaian lingkungan, terdapat tiga tahapan yang direkomendasikan oleh UNEP sebagai bentuk *responsibility to protect international community* dalam mengatasi krisis air di Ogoni yaitu:

a) Tahap pertama rekomendasi UNEP kepada pemerintah Nigeria dalam menangani permasalahan lingkungan khususnya dalam mengatasi terjadinya krisis air di negara tersebut yaitu Pemerintah Nigeria

harus membentuk suatu badan otoritas dalam remediasi lingkungan di Ogoni. Otoritas ini nantinya akan menjadi lembaga pelaksana program yang sudah direkomendasikan UNEP dengan mengimplementasikan program tersebut dalam kurun waktu 10 tahun untuk mengatasi permasalahan krisis air di Ogoni Nigeria.

b) Tahap kedua UNEP merekomendasikan agar pemerintah Nigeria membuat rancangan anggaran dana restorasi lingkungan untuk Ogoni karena pada proses pelaksanaan program pembersihan minyak serta pembangunan fasilitas air dan sanitasi UNEP memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan sebesar USD 1 Milyar. Sehingga pembuatan proposal pendanaan cukup penting di proyeksikan kedalam rancangan anggaran dana agar semua program yang direkomendasikan oleh UNEP dapat terlaksana dengan efektif. Dana tersebut harus digunakan hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan remediasi lingkungan Ogoni, termasuk pembangunan infrastruktur, pendanaan pekerja dan resolusi konflik.

c) Tahapan ketiga yaitu pemerintah Nigeria harus membangun fasilitas pemberdayaan dan pembelajaran untuk remediasi lingkungan khususnya masalah krisis air. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan dampak kontaminasi minyak yang terjadi pada Kawasan Ogoni Nigeria. Selain membangun fasilitas pemberdayaan dan pembelajaran, Pemerintah Nigeria wajib melakukan kampanye social dalam peningkatan *public awareness* yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak lingkungan serta kesehatan

yang timbul akibat krisis air yang terjadi dikawasan tersebut. Tentunya hal tersebut juga harus mencakup komponen pendidikan formal dalam kurikulum akademis di Ogoni Nigeria. Semua pembangunan fasilitas tersebut haruslah didukung oleh pembangunan kapasitas lembaga pemerintah yang sinergis dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang nantinya memungkinkan untuk menjalankan tugas dan mengimplementasikan program secara efektif.

Dari proses penilaian lingkungan hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan krisis air yang berkelanjutan penelitian ini melihat hal tersebut sebagai *responsibility to protect* yang telah dijalankan oleh UNEP. Dalam proses tersebut dapat terlihat bahwa upaya yang dilakukan oleh UNEP terlibat mengatasi permasalahan krisis air di Nigeria, badan internasional tersebut mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan tersebut. Keterlibatan UNEP mampu memenuhi salah satu kebutuhan vital masyarakat Ogoni untuk bisa meraih haknya yaitu memperoleh akses air bersih serta pembersihan minyak di lingkungan Ogoni Nigeria.

5. KESIMPULAN

Ketidakmampuan pemerintah Nigeria dalam mengatasi permasalahan krisis air di Negeranya menjadikan Organisasi Internasional yaitu UNEP terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Keterlibatan UNEP ini merupakan respon atas komitmen Komunitas Internasional dalam bertanggung jawab mengatasi permasalahan krisis air di Nigeria sebagai upaya mengatasi permasalahan yang dapat

mengancam kelangsungan hidup individu di Ogoni, Delta Niger, Nigeria.

Melalui penilaian berbasis lingkungan yang dilakukan oleh UNEP penelitian ini melihat hal tersebut sebagai perwujudan atas *responsibility to protect* komunitas internasional yaitu memfasilitasi masyarakat melalui pencegahan sebab-sebab terjadinya konflik atau permasalahan keamanan insani. Upaya yang dilakukan oleh UNEP melalui program penilaian lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk *prevention* dalam *responsibility to protect* komunitas internasional, hal ini dapat dilihat ketika UNEP memfasilitasi masyarakat Ogoni Nigeria dengan melakukan studi analisis berbasis teknologi untuk mencari solusi terbaik mengatasi permasalahan ancaman keamanan yaitu krisis air di Ogoni. kemudian UNEP juga memfasilitasi perlindungan dan proteksi keamanan masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk menjamin hak-hak warga Negara Ogoni dalam bidang Lingkungan.

Penelitian ini melihat apa yang dilakukan oleh UNEP sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Ogoni melalui penilaian lingkungan serta rekomendasi membuat suatu regulasi kebijakan dan membangun fasilitas sanitasi dan *supply air* yang merata. Hal ini tentunya merujuk pada kategori *protection* dalam *responsibility to protect* komunitas internasional. Selain itu UNEP juga memberikan edukasi dan memberdayakan masyarakat Ogoni sebagai wujud dari *empowerment* dalam *responsibility to protect* komunitas internasional. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab komunitas internasional untuk memastikan bahwa individu di Negara tersebut mampu

melanjutkan hidup ke depannya dengan lebih produktif sehingga mampu melangsungkan hidup dengan aman dan mandiri

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adebandawi, W. (2003). The Press and the Politics of Marginal Voices: Narratives of the Experiences of the Ogoni of Nigeria. *Media Culture Society, Vol.26, No. 763*.
- Agbola, T. (2003). Water Supply and Protection of Urban Watershed. *A Paper Presented at the 20th WEDC International Conference towards the Millennium Development Goals Action for Water and Environmental Sanitation*. Abuja Nigeria.
- Akinwumi, O. (2004). *Crises and Conflicts in Nigeria: A Political History Since 1960*. Munster, Germany: LIT Verlag Munster.
- Ariweriokuma, S. (2008). *The Political Economy Of Oil and Gas In Africa: The Case of Nigeria*. Oxon: Routledge.
- Badejo, P. C. (n.d). Impacts and Management of Oil Spill Pollution along the.
- Chairawaty, F. (2009). Konflik Ekologi Politik Antara Negara Versus Masyarakat, di Nigeria. Studi Kasus: Ogoni, Negara Bagian Rivers State, Tahun 1993-1998 .
- Chukwu, K. E. (2015). WATER SUPPLY MANAGEMENT POLICY IN NIGERIA: CHALLENGES IN THE WETLAND AREA OF NIGER DELTA. *European Scientific Journal, 303-323*.
- Coleman, T. (2012). Who Owns the Water? An Analysis of Water Conflicts in Latin American and Modern Water Law. *the Comparative History of Ideas program University of Washington, Seattle, 1-19*.
- Country Analysis Brief: Nigeria*. U.S. Energy Information Administration. (2005).
- Earth, F. O. (1999). Oil Facts in Nigeria. Retrieved from Friends of The Earth.
- Ebiede, T. M. (2011). Conflict Drivers: Environmental Degradation and Corruption in the Niger Delta Region. *African Conflict and Peacebuilding Review, Vol. 1, No. 1, Indiana University Pres, 139-151*.
- Ekong, F., Jacob, A., & Ebong, S. (2012). Water Resource Management in the Niger Delta Region of Nigeria: The Role of Physical Planning. *International Review of Social Sciences and Humanities*.
- Environment, F. M. (n.d.). *Ogoni Cleanup*. Nigeria: Federal Ministry Of Environment.
- Genova, A., & Falola, T. (2003). Oil in Nigeria: A Bibliographical Reconnaissance. *History in Africa, Vol. 30 (2003), Cambridge University Pres, 133-156*.
- Hallmark, T. (2017, February 13). *Oil And Violence In The Niger Delta Isn't Talked About Much, But It Has A Global Impact*. Retrieved February 27, 2017, from Forbes:<https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2017/02/13/oil-and-violence-in-the-niger-delta-isnt-talked-about-much-but-it-has-a-global-impact/>
- Hegarty, S. (2017, November 30). *BBC News World Africa*. Retrieved from BBC.com: <https://www.bbc.com/news/world-africa-42168902>
- Iheamnachor, D. (2017, November 16). *Ogoni Clean-Up: HYPREP begins selection of firms*. Retrieved from Vanguard:

- <https://www.vanguardngr.com/2017/11/ogoni-clean-hyprep-begins-selection-firms/>
- Kalu, K. N. (2008). *Power, Autarchy, Political Conquest In Nigerian Federalism*. Lanham: The Rowman&Littlefield Publishing Group.
- Katsuma, Y. (2004). Education as an Approach to Human Security:A Case of Afghanistan. *IPSHU English Research Report Series No.19 Conflict and Human Security:A Search for New Approaches of Peace-building*, 197-206.
- Lee, J., Moesinger, K., & Maglio, A. (1997, December). Ogoni and Nigeria conflict over Oil. *The ICE Cases Studies*.
- Livesey, S. M. (2001). Eco-Identityas Discursive Struggle: Royal Dutch/Shell,Brent Spar,and Nigeria. *Journal of Business Communication, Vol 38, No. 58*.
- MacFarlane, S. N., & Khong, Y. F. (2006). *Human Security and the UN A Critical History*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Maclean, S. J., R.Black, D., & M.Shaw, T. (2006). *A Decade of Human Security Global Governance and New Multilateralisms*. United Kingdom: Ashgate .
- Manby, B. (n.d.). Shell in Nigeria: Corporate Social Responsibility and The Ogoni Crisis. *Carnegie Council on Ethics and International Affairs*, n.d.
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- McMahon, P. C. (2017). COOPERATION RULES: INSIGHTS ON WATER AND CONFLICT FROMINTERNATIONAL RELATIONS. *Essays in Scientific and Social Cooperation*, 19-38.
- Niger Delta Environmental Survey (NDES)*. Human Development Reports, UNDP. (2000).
- Nigeria Petroleum Pollution In Ogoni Region. (n.d.). *TED Case Studies*.
- Nigeria, U. (n.d.). *Water, Sanitation And Hygiene*. Retrieved from unicef Nigeria: <https://www.unicef.org/nigeria/wes.html>
- Nigeria: Ogoni Land after Shell. (2008). *International Crisis Group Working To Prevent Conflict Worldwide*.
- Nigeria: Petroleum, Pollution and Poverty in The Niger Delta*. United Kingdom: Amnesty International Publications . (2009).
- Ogoni people struggle with Shell Oil, Nigeria, 1990-1995. (n.d.). *Global Nonviolent Action Database*.
- Ojide, M. G. (2016). Socio-Economic Effects Of Oil And Gas Activities On Ogoniland, Rivers States, Nigeria. *ResearchGate*.
- Okonta, I., & Oronta, D. (2001). *Where Vultures Feast: Shell, Human Right, and Oil in The Niger Delta*. San Fransisco: Sierra Club Books.
- Okwechime, O. O. (2007). Oil and Security in Nigeria: The Niger Delta Crisis. *Africa Development / Afrique et Développement*.
- Onoyume, E. A. (2016, june 2). *Buhari launches clean-up of Ogoni land today*. Retrieved december 18, 2017, from Vanguard:

- <https://www.vanguardngr.com/2016/06/buhari-launches-clean-ogoni-land-today/>
- Osha, S. (2006). Birth of Ogoni Protest Movement. *Journal of Asian and African Studies, Vol.41, No.13*.
- Osuigwe, N. E. (n.d.). Crude Oil, Conflict and Christian Witness In Nigeria: Baptist and Pentecostal Perspectives. *The University Of Edinburgh*, 2010.
- Oyibode, A. (2016). *Ogoni People Are Dying Of Cancer Due To Bad Water- Monarch*. Retrieved Desember 19, 2017, from NAIJ.com:<https://www.naija.ng/1057192-interview-ogoni-people-dying-cancer.html#1057192>
- PBB: 30 tahun untuk bersihkan polusi minyak Nigeria. (2011, agustus 4). *BBC Indonesia*.
- Pink, R. M. (2016). Water Rights in China and India: A Human Security Perspective. *Asian Affairs: An American Review*, 19-35.
- Programme, U. N. (1994). *United Nations Human Development Report*.
- Programme, U. N. (2006). Niger Delta Human Development Report.
- Programme, U. N. (2011). *Environmental Assessment Of Ogoniland*. Nairobi Kenya: United Nations Environment Programme.
- Roy Doron, T. F. (2016, july 29). *The complex life and death of Ken Saro-Wiwa*. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/29/the-complex-life-death-of-ken-saro-wiwa/?hpid=hp_hp-top-table-main-ken-saro-wiwa:live%3Ahomepage%2Fstory&hpid=hp_hp-top-table-main-ken-saro-wiwa:live%3Ahomepage%2Fstory
- https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/29/the-complex-life-death-of-ken-saro-wiwa/?hpid=hp_hp-top-table-main-ken-saro-wiwa:live%3Ahomepage%2Fstory&hpid=hp_hp-top-table-main-ken-saro-wiwa:live%3Ahomepage%2Fstory
- wiwa/?noredirect=on&utm_term=.1a83b6227040
- Sibaud, P. (2012). *Opening Pandora's Box: The New Wave Of Land Grabbing By The Extractive Industries And The Devastating Impaction Earth*.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R7D*. Bandung: alfabeta.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security Concepts and Implications*. London and New York: Routledge Taylor&Francis Group.
- UNPO, U. N. (2018). UNPO Submits Report for Universal Periodic Review on Nigeria
- Vidal, J. (2011, August Thursday). *The Guardian.com News Environment*. Retrieved from The Guardian.com : <https://www.theguardian.com/environment/2011/aug/04/niger-delta-oil-spill-clean-up-un>
- W.F., B. T. (n.d.). *Nigeria-the Ogoni Dilemma*. Retrieved from <http://dspace.dial.pipex.com/suttonlink/327ni.htm>